

## MODEL PROJECT CITIZEN UNTUK PENGUATAN CIVIC LITERACY RESOLUSI KEKERASAN DI KAMPUS

Oleh :

**Zaenul Slam**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

email: zaenul\_slam@uinjkt.ac.id

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 8 Januari 2024  
Revisi, 13 Februari 2024  
Diterima, 22 April 2024  
Publish, 15 Mei 2024

#### Kata Kunci :

*Projec Citizen*,  
*Civic Literacy*,  
Resolusi,  
Kekerasan Seksual.



### ABSTRAK

Kampus sebagai wahana pendidikan karakter ternyata tidak steril dari kasus kekerasan seksual akibat dari melemahnya civic literacy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana civic literacy resolusi kekerasan seksual dikuatkan melalui model *Project Citizen (PC)*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk meneliti masalah kekerasan seksual dan memecahkannya. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan eksplorasi dokumen portofolio seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Hasil penelitiannya bahwa model *PC* dapat menguatkan civic literacy resolusi kekerasan seksual bagi mahasiswa. Selain itu, model *PC* dapat menghadirkan kemandirian, gotong royong, tanggung jawab, kritis, dan kreatif mahasiswa.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Zaenul Slam

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zaenul\_slam@uinjkt.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Literasi Kewarganegaraan (*civic literacy*) merupakan dimensi penting yang mesti dikuasai setiap warga negara muda di era revolusi industri 4.0. dan era society 5.0, karena keduanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. *Civic literacy* adalah hal penting dalam membentuk karakter peserta didik dan rendahnya literasi kewarganegaraan akan berdampak pada berbagai permasalahan nasional (Anditasari, *et al.*, 2023). *Civic literacy* sebagai sarana menguatkan ketahanan pribadi (Saidi, 2022). *Civic literacy* penting untuk peningkatan partisipasi politik yang berkualitas (Rahman, 2016). *Civic literacy* merupakan indikator penting bangsa yang cerdas dan berbudaya (Irianto & Febrianti, 2017).

Literasi kewarganegaraan merupakan kemampuan warganegara memahami segala aktifitas dan permasalahan masyarakat, politik dan kultur lokal maupun global serta cinta tanah air (Suryadi, 2010). Literasi kewarganegaraan adalah kemampuan memahami dan menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Literasi kewarganegaraan adalah pengetahuan dan keterampilan melihat, memahami,

dan mengatasi masalah sosial, politik, dan kenegaraan (Saidi, *et al.*, 2022).

Isu gender merupakan isu kewargaan dan warga negara mesti menguasai literasi tersebut. Gender merupakan wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Walaupun permasalahan gender biasanya identik dengan ketidakadilan pada perempuan dan anak, tetapi perempuan dan anak banyak menerima ketidakadilan tersebut. Seperti Hasanah (2013) menyatakan perempuan dan anak paling sering menjadi korban tindak kekerasan dari pada laki-laki. Persoalan ketidakadilan itu dalam wujud kekerasan, pelecehan, dan tindakan penganiayaan. Hidayat (2020) menyatakan salah satu tindak kejahatan yang fenomenal saat ini adalah kekerasan seksual.

Nikmatullah (2020) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual disebabkan faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang didukung oleh rape culture menempatkan perempuan dan anak sebagai korban utama. Kampus yang sejatinya sebagai wahana pendidik karakter baik mahasiswa ternyata juga tidak steril dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Persoalan seperti gunung es

tersebut di atas tidak boleh dibiarkan dan kampus memiliki peran penting dalam pembinaan moral mahasiswa (Nurpratiwi, 2021). Peran sebagai agen sosial kemerosotan moral dipandang sebagai agen penyadaran moral agar terbangun kembali karakter baik (Angkawijaya, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan di kampus memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam resolusi kekerasan seksual. Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan untuk mendidik warga negara tentang hak-hak mereka dan agar sistem demokrasi dapat berfungsi dengan baik dan sehat (Swift, 2017). Murdiono (2022) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai pembentuk warga negara yang cerdas dan baik serta demokratis dan tanggungjawab. Nurdin (2012) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk “smart and good citizen”. Winataputera & Budimansyah (2007) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi bermutu dan bertanggung-jawab dalam kehidupan masyarakat dan politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan sejatinya diproyeksikan sebagai subjek pembelajaran penguatan peserta didik berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan tanggung jawab (Budimansyah, 2012).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab besar mengembangkan literasi kewarganegaraan mahasiswa. Apabila mencermati materi yang diajarkan di dalam Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya mampu menguatkan literasi kewarganegaraan. Namun berbeda dengan keharusannya, faktanya masih ditemukan lemahnya literasi kewarganegaraan anak negeri dalam fenomena sosial dan politik seperti masipnya kekerasan seksual.

Berdasarkan persoalan tersebut, diperlukan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi untuk menguatkan civic literacy resolusi kekerasan seksual. Akan tetapi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saat ini masih lemah untuk penguatan civic literacy resolusi kekerasan seksual. Widiatmaka (2016) menyatakan bahwa kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah masih mengedepankan pengetahuan kewarganegaraan sehingga tujuan untuk penguatan literasi kewarganegaraan resolusi kekerasan seksual masih belum maksimal terealisasi. Akibatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bosan karena kebanyakan teori dan kurang praktik. Winataputera dan Budimansyah (2007) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan mengakibatkan porsi peningkatan sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan terbengkalai.

Kelemahan mendasar lainnya, menurut

Kurniawan (2017) hasil belajar mahasiswa belum maksimal. Hal ini terjadi disebabkan penggunaan metode pembelajaran kebanyakan kurang efektif. Sebagian besar metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas yang digunakan para dosen masih menggunakan ceramah yang monoton. Kerr (1999) menyebutnya model didactic transmission, proses perkuliahan ibarat mengisi botol kosong dengan air hingga penuh sehingga pembelajaran berlangsung satu arah dan dosen bertindak lak sumber pengetahuan bagi para mahasiswa. Dengan pembelajaran model ini, para mahasiswa hanya disiapkan mendengarkan, menerima informasi dan mentaati peraturan dosennya yang mengakibatkan mereka tidak memiliki keberanian menyampaikan pandangannya apalagi berpikir kritis dan problem solving.

Untuk penguatan civic literacy resolusi kekerasan seksual dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan pendekatan yang efektif. Seperti untuk meraih capaian lulusan, pendekatan proses pembelajaran sejatinya interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 1). Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan mesti dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Pertama, activist, setting kelas yang menggunakan model-model kelompok-kelompok kecil empat hingga enam orang, model angkare, dan lingkaran dimana meja guru berada di tengah-tengah kelompok para mahasiswa tidak lagi terpisah secara elitis di depan kelas. Kedua, participative, manajemen pembelajaran mesti memaksimalkan partisipasi mahasiswa secara aktif. Ketiga, process led, perlu mengoptimalkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan gembira dan berbobot.. Keempat, value based, pembelajaran lebih berbasis nilai. Kelima, interactive, proses belajar tidak dilakukan satu arah melainkan multi arah. Keenam, more difficult to achieve, hasil belajar mestinya sedikit sulit untuk diraih seperti laporan hasil wawancara, laporan observasi, proyek belajar untuk memecahkan masalah, perilaku keseharian di kampus, portofolio dan sebagainya. Ketujuh, citizenship education perlu mengembangkan pengalaman belajar di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan media sosial (Keer, 1999; Budimansyah, 2010).

Berdasarkan pendekatan pembelajaran tersebut, suatu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk penguatan civic literacy resolusi kekerasan seksual adalah model Project Citizen (PC). Sapriya dan Winataputera (2004) mengemukakan bahwa model PC ini memperkenalkan kepada para mahasiswa dan mendidik mereka dengan metode-metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Model PC bertujuan membina komitmen aktif

mahasiswa pada kewarganegaraannya dan pemerintahannya dengan cara membekali: 1) pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif, 2) pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efektivitas perkuliahan, 3) pemahaman akan pentingnya partisipasi warga negara. Winataputera dan Budimansyah (2007) mengatakan model PC ini didesain untuk mengembangkan minat dan kemampuan mahasiswa untuk berpartisipasi dengan berkemampuan dan penuh tanggung jawab dalam pemerintahan.

Center For Civic Education (2000) menyatakan tujuh keuntungan bila model PC dapat dipraktikkan secara baik, yaitu menjadikan mahasiswa: 1) terhubung dengan peristiwa dan masalah dunia nyata, 2) mengintegrasikan berbagai konsep dan ide-ide terkait, 3) dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu; (4) belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dalam suatu kelompok, 5) mengevaluasi kemajuan mereka sendiri melalui penilaian diri, 6) berhubungan dengan kegiatan penilaian untuk kegiatan perkuliahan; dan (7) memanfaatkan keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat lainnya.

Penelitian sebelumnya, model PC telah terbukti berhasil mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan dan mendorong pengembangan literasi dan kemandirian kewarganegaraan (Vontz, Metcalf, & Patrick, 2000). PC terbukti mampu mengembangkan keterampilan kolaboratif dan efikasi diri di antara para pesertanya sebagaimana dibuktikan dengan pertumbuhan di setiap komponen program, dan diperkuat dengan ekspresi efikasi kolaborasi. PC sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan kolaboratif peserta didik (Morgan, 2016).

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni penggunaan model project citizen untuk penguatan kompetensi kewarganegaraan namun ada perbedaan sebagai novelty karena penelitian ini lebih spesifik pada penggunaan model PC untuk penguatan civic literacy resolusi kekerasan seksual in campus.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan penguatan *civic literacy* resolusi kekerasan seksual di kampus melalui model PC.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan adalah untuk menjawab persoalan yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi, dilakukan secara wajar dan alami dan jenis data yang dikumpulkan data kualitatif (Arifin, 2014). Studi kasus dilakukan untuk menyelidiki suatu masalah secara mendalam dan sistematis serta memecahkan masalah tersebut (Nurhasanah, et al., 2022).

Subyek penelitian adalah 35 mahasiswa kelas

3C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa semester 2 Tahun akademik 2021/2022 yaitu bulan April sampai Mei 2022. Subjek yang diteliti mempraktikkan model project citizen untuk civic literacy resolusi kekerasan seksual dikemas dengan langkah-langkah berikut: 1) mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat; 2) memilih masalah kajian kelas; 3) mengumpulkan informasi tentang masalah kajian kelas; 4) mengembangkan portofolio kelas; 5) menyajikan portofolio kelas dalam suatu simulasi; dan 6) refleksi pengalaman belajar (*Center For Civic Education, 2000*).

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan eksplorasi dokumen portofolio seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap empat mahasiswa yang sedang melaksanakan model PC untuk civic literacy resolusi kekerasan seksual. Pada saat yang sama, observasi dilakukan ketika model PC tersebut berlangsung. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan model triangulasi temuan, yaitu dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai (Nurhasanah, 2022).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan model Project Citizen (PC) dalam Pendidikan Kewarganegaraan mampu menguatkan civic literacy mahasiswa dalam resolusi kekerasan seksual di kampus.

*Center for Civic Education (2000)* menyatakan bahwa proyek ini dimaksudkan untuk membantu siswa belajar bagaimana menyampaikan pendapat, memutuskan tingkat pemerintahan mana dan lembaga mana yang paling tepat untuk menangani masalah yang teridentifikasi, dan mempengaruhi keputusan kebijakan di tingkat pemerintahan. Model PC mengacu pada prinsip belajar peserta didik aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (Budimansyah, 2002).

Winataputera dan Budimansyah (2007) menyatakan bahwa model PC yang pada dasarnya berorientasi pada proses "critical thinking oriented and problem solving-oriented" salah satunya adalah resolusi kekerasan seksual di kampus. Lebih lanjut, Budimansyah (2009) menyatakan bahwa model PC menerapkan model "portofolio-based learning" dan portofolio assissted assessment yang memadukan secara sinergis model-model pemecahan masalah sosial, penelitian sosial, keterlibatan sosial, pembelajaran kooperatif, simulasi pendengaran pendapat, dialog mendalam dan pemikiran kritis, klarifikasi nilai, dan pembelajaran demokratis.

Azmi (2020) menyatakan bahwa model PC sebagai model pembelajaran berbasis proyek bertujuan mengasah daya kritis para mahasiswa agar mereka mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu mencari solusinya.

Apandie dan Rahmelia (2022) menyatakan bahwa model project citizen mampu menumbuhkan budaya kritis mahasiswa pada kebijakan-kebijakan serta aturan pemerintah yang ada dan mereka memiliki perspektif baru dalam menyikapi sebuah permasalahan.

Sundawa dan Dahliyana (2022) menyatakan bahwa pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan berbasis proyek dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi sehingga peserta didik memahami permasalahan nyata dan menemukan solusi bersama mulai dari mengidentifikasi kajian kebijakan alternatif hingga menemukan cara menyelesaikan permasalahan tersebut melalui langkah-langkah nyata.

Berikut ini adalah deskripsi penerapan model PC untuk civic literacy dalam resolusi kekerasan seksual di kampus.

#### Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik

Pada kegiatan ini, untuk melakukan identifikasi masalah, dosen menugaskan kepada mahasiswa melakukan diskusi kelas berbagi pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan yang dianggap penting oleh mahasiswa, orang lain, dan masyarakat. Lembaga pemerintah mana yang bertanggung jawab mengatasi masalah tersebut. Kebijakan apa saat ini yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah keuntungan dan kerugiannya dari kebijakan itu? Bagaimana kebijakan itu bisa diperbaiki? Apakah kebijakan itu perlu direvisi? Mengapa? Adakah silang pendapat di masyarakat terkait kebijakan tersebut. Dosen mengarahkan para mahasiswa untuk mencatat hal-hal apa saja yang sudah mereka ketahui tentang masalah-masalah atau hal apa yang telah mereka dengar dari diskusi tentang masalah tersebut. Selanjutnya dosen memberi pekerjaan rumah kepada mereka untuk mewawancarai orang tua dan orang lain di lingkungan masyarakat tentang masalah-masalah dan tanggapan terhadap masalah tersebut. Selain itu, Dosen menugaskan mahasiswa untuk mencari informasi dari sumber-sumber cetak, informasi melalui radio dan televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar mahasiswa peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya, mulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarganya dan kampusnya hingga ke lingkungan terjauh, misalnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antarbangsa dan ini merupakan salah satu ciri warganegara yang baik dan cerdas (Budimansyah, 2002).

Winataputera dan Budimansyah (2007) menyatakan bahwa pada langkah identifikasi masalah kebijakan publik, kelas perlu difasilitasi untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi yang relevan dilakukan secara kelompok. Hasil wawancara dengan A bahwa model project citizen membelajarkan kepada mahasiswa kepekaan terhadap masalah-masalah yang

terjadi dalam lingkungan kampus maupun luar kampus seperti keluarga sampai masyarakat internasional (A, 2022).

*Center for Civic Education* (2000) menyatakan bahwa tujuan dari langkah ini adalah agar dapat membantu kelas memperoleh informasi yang cukup untuk membuat pilihan cerdas terhadap satu masalah spesifik untuk dipelajari. Hasil wawancara dengan B, bahwa dengan model project citizen dengan tahap mengidentifikasi masalah, kami para mahasiswa berbagi pengetahuan tentang masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dan kami menentukan satu pilihan yang tepat.

Berdasarkan hasil diskusi kelas ini, para mahasiswa mampu mengidentifikasi sepuluh masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu: 1) korupsi, kolusi, dan nepotisme, 2) penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, 3) kekerasan seksual in Campus, 4) radikalisme dan terorisme, 5) dampak negative pembelajaran online, 6) tawuran pelajar, 7) demonstrasi rusuh, 8) cara-cara mencegah dan menanggulangi banjir, 9) praktik politik uang, dan 10) problem sampah di kota-kota besar.

Hasil ini relevan dengan pendapat Indriyani (2019) yang menyatakan bahwa dengan project citizen mampu menguatkan daya nalar kritis. Peserta didik mampu melihat suatu fenomena di masyarakat dari berbagai perspektif dan mampu mencari solusi untuk menyikapi fenomena masyarakat yang ada secara kritis.

Relevan juga dengan hasil penelitian Maksum (2015) bahwa model project citizen mampu meningkatkan literasi kewarganegaraan, yakni kecakapan intelektual dengan indikator mengidentifikasi masalah yang signifikan. Jadi dengan diskusi kelas, para mahasiswa difasilitasi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, dibelajarkan berpikir kritis dengan mengkaji masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan dibelajarkan untuk memahami lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Para mahasiswa mengkaji keuntungan dan kerugiannya dari kebijakan tersebut. Para mahasiswa mengkaji pula kebijakan tersebut perlu diperbaiki atau diganti. Para mahasiswa juga mengkaji perbedaan pendapat dalam masyarakat berkenaan dengan kebijakan tersebut.

#### Memilih Masalah Untuk Fokus Kajian Kelas

Pada langkah ini, Dosen menugaskan kepada kelas untuk mendiskusikan apa yang telah mahasiswa temukan tentang masalah-masalah di masyarakat. Dosen menentukan apakah mahasiswa cukup informasi untuk memilih satu masalah yang akan dikaji oleh kelas. Selanjutnya untuk memilih satu masalah yang akan dikaji oleh kelas. Pertama, bila kelas merasa memiliki kecukupan informasi untuk menentukan keputusan, maka kelas mesti menentukan satu masalah berdasar suara terbanyak. Dosen memastikan bahwa mahasiswa memilih satu masalah yang penting bagi dirinya dan

masyarakatnya. Dosen memastikan juga pada mahasiswa bahwa informasi berkenaan dengan masalah ini dapat ia kumpulkan untuk membuat dokumen portofolio yang baik. Kedua, jika kelas menganggap perlu informasi tambahan sebelum memutuskan satu masalah yang menjadi kajian kelas, Dosen menyampaikan tugas PR pada kelompok yang berbeda untuk mengumpulkan informasi tambahan terkait masalah-masalah yang akan dipilih.

Berikut ini adalah tahapan memilih masalah untuk fokus kajian kelas. Pertama, membuat daftar permasalahan. Setiap kelompok yang telah selesai mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan informasi yang memadai, menentukan satu masalah dan menuliskannya dalam daftar permasalahan di papan tulis. Kedua, melakukan pemungutan suara dengan one man one vote. Setelah informasi terkait masalah tersebut dipahami para mahasiswa, kemudian kegiatan pemilihan permasalahan dapat dilakukan. Agar permasalahan yang dipilih benar-benar bermutu, proses pemilihan permasalahan dilakukan dua tahap. Pemilihan permasalahan pada tahap pertama, setiap mahasiswa menentukan tiga pilihan permasalahan secara terbuka dengan memberikan tanda pagar pada masing-masing permasalahan yang dipilih. Setelah seluruh mahasiswa menentukan pilihannya, terdapat tiga permasalahan yang paling banyak dipilih pada pemilihan tahap pertama, yaitu: 1) kekerasan seksual di kampus (memperoleh 20 suara); 2) penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja (memperoleh 18) suara dan 3) menanggulangi dampak negatif pembelajaran online (memperoleh 13 suara). Ketika kelas harus memilih satu permasalahan selanjutnya dilakukanlah pemilihan permasalahan tahap kedua. Pemilihan permasalahan tahap kedua dilakukan secara tertutup. Setiap mahasiswa hanya memilih satu permasalahan dari tiga permasalahan yang paling banyak dipilih pada pemilihan permasalahan tahap pertama. Berikut ini adalah hasil pemilihan permasalahan tahap kedua, yaitu permasalahan yang paling banyak memperoleh suara adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak memperoleh 22 suara. Jadi, permasalahan tersebut sebagai kajian kelas. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan model project citizen pada sintak ini, mahasiswa dibelajarkan sikap demokratis dan memiliki sikap demokratis yang bertanggung jawab. Mahasiswa yang tidak memilih permasalahan tersebut menghormati, menghargai dan menerima pilihan berdasar suara terbanyak. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk hidup berdemokrasi Pancasila. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Mulyani (2011) yang menyatakan bahwa model *project citizen* dapat mengembangkan sikap demokratis peserta didik, hampir semua peserta didik berani menyampaikan pendapat, berani berbeda pendapat, menjunjung tinggi nilai toleransi, mau menghargai dan apresiatif terhadap pendapat atau gagasan peserta didik lain, mau bekerjasama dan mematuhi aturan main yang telah dibuat. Relevan juga

dengan pendapat Trisiana dan Wartoyo (2020) *project citizen* sebagai satu perlakuan pembelajaran berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan demokratis yang mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan di masyarakat.

Mengumpulkan Informasi Terkait Masalah yang Menjadi Fokus Kajian Kelas

Ketika kelas telah memilih satu masalah, yaitu kekerasan seksual di kampus maka pada langkah ini kelas difasilitasi dosen untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang terkait dari berbagai sumber informasi yang sesuai dan tersedia, yakni perpustakaan, kantor penerbitan surat kabar, profesional dan ahli, pejabat pemerintah, kantor legislatif, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, jaringan informasi elektronik dan tokoh serta anggota masyarakat.

Berdasarkan sumber informasi surat kabar (Dokumentasi Portofolio Seksi Penayangan, 2022) beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus sebagai berikut. Kasus di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Adam, 2019), Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Aulia, 2019), UIN Sunan Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang (Zuhra, 2019). UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung (Wijaya, 2019), Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya (Faizal, 2020), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Amindoni, 2020), UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta (Fudhul, 2020), Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syah) Jakarta (Damayanti, 2022). Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang (Putera, 2021) termasuk Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar (Pratiwi, 2022).

Hasil wawancara para mahasiswa dengan tokoh akademisi dan masyarakat sebagai berikut: pertama, menurut Masitoh bahwa resolusi kekerasan seksual yang terjadi di kampus sangat penting. Karena dari kekerasannya saja sudah bentuk kedholiman apalagi seksualnya yang dapat menimbulkan trauma, kerugian banyak, sehingga memunculkan stigma bahwa perempuan dan anak itu mudah dieksploitasi. Kedua, menurut Muhammad Noviansyah, masalah kekerasan seksual terhadap perempuan sangat penting untuk diselesaikan. Dikarenakan hal tersebut dapat terjadi pada siapapun dalam lingkungan kampus, yang dapat membuat terganggunya proses perkuliahan dan dapat menyebabkan seseorang trauma yang berkepanjangan jika hal tersebut terjadi. Ketiga, menurut Vina Mahdalena, resolusi masalah kekerasan seksual di kampus merupakan masalah HAM. Biasanya korban hanya bisa diam karena mendapat ancaman dari pelaku. Maka pihak yang berwenang perlu menindak tegas berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Beliau juga menyatakan tidak semua orang memiliki perhatian "awareness".

Keempat, menurut Endah Susanti, salah satu

konsultansi Hukum di Jakarta bahwa resolusi sangat penting, karena kekerasan seksual adalah yang merendahkan, menghinakan, melecehkan seseorang yang berakibat penderitaan baik psikis maupun fisik. Kelima, menurut Nurhasanah selaku Guru Bimbingan Konseling Madrasah Aliyah Negeri 20 Jakarta bahwa resolusi masalah kekerasan seksual sangat penting karena dalam Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Keenam, menurut Muhammad Wavi Ramadhan, resolusi masalah pelecehan seksual ini merupakan hal sangat penting karena terkait tindakan menurunkan martabat atau harga diri seseorang, karena juga ini berdampak pada kesehatan mentalnya seperti depresi, takut, cemas sehingga yang bersangkutan trauma tidak jarang akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya.

Hasil laporan tertulis mahasiswa tentang ulasan radio dan televisi bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak juga sering didengar dan dilihat dalam siaran radio dan televisi, hal ini menunjukkan betapa penting dan seriusnya masalah ini di negara kita. Rangkuman ulasan beberapa berita dari televisi mengenai kasus kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini adalah sebagai berikut: 1) Ayah dan dua anak pemerkosa wanita sedarah di Lampung, 2) Gadis berkebutuhan khusus diperkosa teman medsos, 3) Korban pelecehan seksual model cantik asal Malang di Media Sosial, dan 4) Pelecehan seksual mahasiswi Universitas Riau.

Hasil laporan tertulis mahasiswa tentang petikan dari sejumlah publikasi Pemerintah sebagai berikut: pertama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bagian program Merdeka Belajar Keempat Belas. Nadiem mengutip data dari Komisi Nasional Perempuan sepanjang 2015-2020 bahwa dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27% kasus terjadi di perguruan tinggi dan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus selama ini tak terungkap karena sering kali korban takut melapor karena kuatnya relasi kuasa para pelaku dan tak adanya payung hukum. Kedua, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menyebutkan saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi darurat kekerasan seksual. Ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap yang membahayakan, bukan hanya dari para korban, tetapi juga bagi kehidupan sosial, bangsa dan negara. Peraturan terkait tindak pidana kekerasan seksual perlu diperkuat dengan adanya Undang-Undang khusus dan komprehensif seperti Undang-

Undang Penghapusan kekerasan Seksual yang harus segera dibentuk.

Herdiani (2019) menyatakan bahwa saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tanpa keadilan gender. Hukum seharusnya keadilan gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana menyatakan bahwa: pertama, perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kedua, dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan kegiatan model *project citizen* pada sintak ini, para mahasiswa dibelajarkan dan dilatih mencari informasi lebih banyak dan mampu mengidentifikasi sumber-sumber informasi dari perpustakaan, surat kabar, pakar Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan dan kelompok kepentingan dan televisi. Mahasiswa perlu melakukan wawancara dengan beberapa tokoh terkait kekerasan seksual di kampus. Jadi, dengan sintak ini, mahasiswa selain dibelajarkan pemahaman yang mendalam terkait kekerasan seksual di kampus dari berbagai sumber juga dididik, dibelajarkan, dan dilatih mengasah keterampilan komunikasi dengan para tokoh/pakar terkait. Oleh karena itu, kegiatan ini juga dapat menghadirkan daya komunikasi, kolaborasi, kritis, dan kreatif para mahasiswa.

Hal ini relevan dengan hasil penelitian Yusuf, Hayati & Fajri (2019) bahwa dengan sintak ketiga ini peserta didik didorong untuk banyak membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber informasi. Kegiatan peserta didik mencari informasi melalui membaca memerlukan tingkat analisis, menafsirkan dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan sebagai dasar dalam membuat simpulan serta alasan yang mendasarinya. Adanya proses tersebut mampu memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan berbagai macam keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Safitri et al. (2022) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang disertai dengan aktivitas belajar dengan sumber belajar lain mampu memotivasi peserta didik untuk mendapatkan dan menyampaikan ide dan gagasannya berdasarkan apa yang mereka amati dan apa yang mereka lakukan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi peserta didik. White et al. (2009) bahwa proses menjelaskan dan memberikan contoh, memberikan alasan, mencari persamaan dan perbedaan, menentukan ide utama dan

menarik simpulan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik.

#### Mengembangkan Portofolio Kelas

Pada sintak ini, kelas mengembangkan portofolio berupa kumpulan hasil kerja kelompok dalam rangka resolusi terhadap masalah tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang menggambarkan saling keterkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas pilihan kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kelas dibagi ke dalam empat kelompok, setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat bagian portofolio. Spesifikasi portofolio meliputi seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Untuk seksi penayangan kerja masing-masing dari keempat kelompok ditempatkan pada satu panel terpisah dari tayangan empat panel. Bahan-bahan yang ditayangkan meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber, peta, grafik, photo, karya seni asli, dan sebagainya. Sedangkan untuk seksi dokumentasi, masing-masing dari keempat kelompok harus memilih dari bahan-bahan yang paling baik atau memberi bukti penelitiannya.

Tugas kelompok portofolio, yaitu: Kelompok portofolio kesatu adalah menjelaskan masalah yang telah dipilih oleh kelas, yakni kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kelompok ini pun menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan lembaga pemerintah mana yang menangani masalah tersebut.

Mengapa masalah ini dianggap penting? Jelas penting, dari kekerasannya saja sudah bentuk kejahatan apalagi seksualnya yang dapat menimbulkan trauma, kerugian banyak, sehingga memunculkan stigma bahwa perempuan itu mudah dieksploitasi. Masyarakat yang berkependidikan pasti menganggap masalah ini penting karena orang yang sehat mental dan pikirannya tidak mau menerima kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual.

Beberapa lembaga pemerintah yang harus menangani masalah tersebut adalah: 1) Kemendikbudristek, 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 4) Polisi, 5) Kejaksaan, dan 6) kehakiman.

Kelompok portofolio kedua, kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan atau pilihan yang dirancang untuk memecahkan masalah.

Beberapa kebijakan pilihan untuk resolusi kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang diajukan kelompok kedua ini adalah: 1) memberikan hukuman social pada pelaku sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan pada korban, 2) menghilangkan kemampuan pro-kreasinya dengan melakukan pengebirian sebagai bentuk hukuman, 3) melakukan pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau

dokumen elektronik untuk tujuan seksual, 4) setiap perusahaan/lembaga menyiapkan ruang serta prasarana dan fasilitas pengaduan para pekerja/karyawan/mahasiswa/siswa untuk mendapat perlindungan, 5) diberikan hukuman pidana yang adil sesuai peraturan yang berlaku, 6) layanan SAPA 129 sebagai solusi dalam memberikan pendampingan terbaik bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 7) layanan bantuan hukum dalam hal pendampingan dan layanan pemulihan, dan 8) melakukan edukasi anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Kelompok portofolio ketiga, kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan publik tertentu yang disepakati oleh mayoritas kelas untuk mendukungnya serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut.

Alternatif yang dipilih kelompok portofolio ketiga yang diyakini bisa menuntaskan resolusi kekerasan yang terjadi di kampus adalah melaksanakan edukasi anti kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui seminar maupun media sosial khususnya bagi kalangan mahasiswa. Kelompok portofolio keempat bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan bagaimana mahasiswa sebagai warga negara muda dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

#### Menyajikan Portofolio Kelas

Pada langkah ini, portofolio yang telah dikembangkan disajikan dalam kegiatan penyajian lisan/showcase. Menurut *Center for Civic Education (2000)* bahwa tujuan menyajikan portofolio adalah untuk: 1) menginformasikan kepada hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi di masyarakat, 2) menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap kebijakan, 3) mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah. Untuk membuat dan mendukung pendapat kelas bahwa kebijakan yang diusulkan tidak melanggar perundang-undangan, 4) membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif terkait kebijakannya.

Dalam penyajian portofolio, setiap kelompok menggunakan panduan berikut: pertama, pembukaan penyajian lisan, yakni empat menit pertama merupakan tahap pembukaan di mana kelompok menyajikan secara lisan informasi yang paling bermakna dari portofolionya, yaitu: 1) penyajian berdasar pada seksi tayangan dan dokumentasi portofolio. 2) menggunakan grafik-grafik dari portofolio untuk membantu mahasiswa menjelaskan hal penting. 3) hanya bahan-bahan yang termasuk dalam portofolio mahasiswa yang dapat digunakan penyajian lisan.

*Kedua*, pertanyaan lanjutan, enam menit berikutnya merupakan forum pertanyaan, saat para penilai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

penyaji terkait penyajian portofolionya. Selama periode ini para penilai meminta penyajian untuk: 1) menjelaskan lebih jauh atau mengungkapkan pendirian-pendirian mahasiswa, 2) memberikan contoh gagasan-gagasan khusus para mahasiswa, 3) mempertahankan beberapa pernyataan, 4) menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang telah mahasiswa pelajari. Masalah apakah yang Anda hadapi? Hal-hal terpenting apakah yang para mahasiswa pelajari ketika mereka mempelajari masalah di masyarakat itu?

Ketiga, persiapan. Hal-hal yang disiapkan sebelum showcase adalah portofolio, penyajian lisan, tempat pelaksanaan, juri, dan moderator. Yang disiapkan pertama kali adalah portofolio meliputi dua seksi, yaitu portofolio seksi penayangan dan dokumentasi. Portofolio penayangan, yaitu portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase. Bagian ini terdiri atas empat lembar papan poster dengan ukuran masing-masing dari keempat papan panel tersebut 75 cm dan tinggi sekitar 90 cm. Karya dari masing-masing kelompok ditempatkan pada salah satu dari empat panel ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang ditayangkan meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber informasi, peta, grafik, foto, gambar, karikatur, karya seni asli yang relevan dengan tema proyek. Portofolio seksi dokumentasi adalah portofolio yang disimpan pada sebuah binder yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok. Bagian ini merupakan kumpulan bahan-bahan terbaik sebagai bukti dokumen, yaitu berupa berita, artikel, gambar, foto, grafik, table, data lengkap hasil wawancara, data hasil analisis bahan cetak dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut disatukan dalam sebuah binder bercincin tiga. Bahan-bahan tersebut dipisahkan kedalam empat bab. Bab pertama, berisi penjelasan masalah; Bab kedua, kebijakan pilihan untuk memecahkan masalah, Bab ketiga, usulan kebijakan pilihan untuk memecahkan masalah; Bab keempat, berisi rencana tindakan. Untuk memisahkan keempat bab tersebut menggunakan pemisah berwarna beda. Pastikan keempat panel portofolio seksi penayangan yang dibuat oleh masing-masing kelompok sudah disatukan menjadi portofolio kelas dan portofolio seksi dokumentasi yang terdiri dari empat Bab sudah selesai disusun.

Komponen kedua adalah showcase. Para mahasiswa melakukan latihan menyajikan secara lisan terlebih dahulu sebelum menyampaikannya dihadapan hadirin dan dewan juri. Komponen ketiga yang disiapkan adalah tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan adalah di ruang aula Lantai 2 Kampus Pendidikan Profesi Guru Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang beralamat di Bojong Sari Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Komponen keempat adalah menyiapkan tiga dewan juri yang semuanya adalah dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang relevan dengan keahliannya. Selanjutnya melakukan briefing tentang

tugas dewan juri. Komponen kelima yang disiapkan adalah moderator. Moderator showcase adalah Dosen Pembimbing kelas yang bersangkutan. Tugas moderator itu selain memimpin jalannya showcase, juga memberikan pengarahan kepada anggota dewan juri tentang tugas-tugas juri dan sistem penilaian yang dipergunakan. Disamping itu moderator meminta kesepakatan anggota dewan juri untuk menetapkan salah seorang dari mereka menjadi ketua dewan juri demi kelancaran aturan penjurian.

Keempat, Panduan, yaitu: 1) Setiap kelompok anggota kelompok sebanyak mungkin berpartisipasi dalam penyajian pembukaan dan periode pertanyaan lanjutan, 2) Penyajian lisan tidak oleh satu atau dua orang mahasiswa. Penyajian lisan menampilkan proses pembelajaran kooperatif yang termasuk ke dalam persiapan portofolio, 3) Jangan membacakan dari tayangan portofolio kepada juri. Pilih informasi dan argument terpenting dan sajikan menurut gaya berbicara. Mahasiswa dapat menggunakan catatan selama presentasi pembukaan tetapi tidak boleh selama periode pertanyaan lanjutan, 4) Jika waktu empat menit penyajian pembukaan tersebut tidak digunakan seluruhnya, maka waktu yang tersisa akan ditambahkan untuk pertanyaan lanjutan. Setiap kelompok berhak atas sepuluh menit waktu penyajian lisan dihadapan dewan juri. Selama penyajian lisan, mahasiswa hanya diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kelompok portofolio mahasiswa.

Kelima, Kriteria penilaian, apabila kelas memutuskan untuk ikut dalam lomba yang memuat penyajian lisan, maka penyajian lisan para mahasiswa dinilai oleh sebuah panel juri. Dosen menjelaskan kriteria yang digunakan dalam menilai penyajian-penyajian tersebut.

Berikut ini adalah penyajian lisan empat kelompok portofolio. Sebelum showcase dilaksanakan pembukaan terlebih dahulu. Moderator membuka acara dan selanjutnya menginformasikan permasalahan yang dikaji oleh kelas, yakni tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Selanjutnya mengenalkan nama-nama anggota dewan juri dan mempersilahkan anggota dewan juri mengamati portofolio kelas seksi penayangan maupun portofolio seksi dokumentasi. Durasi waktu untuk fase ini sepuluh menit.

Penyajian lisan kelompok portofolio satu. Moderator memanggil kelompok portofolio satu untuk memasuki ruangan. Moderator meminta hadirin memberikan tepuk tangan sehingga suasana meriah. Moderator mempersilahkan juru bicara memperkenalkan diri dengan mengenalkan anggota-anggota kelompoknya. Mempersilahkan juru bicara kelompok portofolio satu untuk menjelaskan permasalahan sebagai kajian kelas dihadapan dewan juri selama lima menit. Selanjutnya juru bicara kelompok portofolio satu menyampaikan hal-hal berikut: "Salah satu masalah yang sangat serius yang menyita perhatian masyarakat luas saat ini adalah

kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kampus sebagai pendidik karakter ternyata tidak steril dari tindak kekerasan seksual. Apakah kekerasan seksual itu? adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Seberapa luas masalah tersebut tersebar pada bangsa dan negara kita? Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus. Kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh rape culture menempatkan perempuan sebagai korban utama. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus saat ini bukan hanya masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Mengapa masalah ini harus ditangani oleh Pemerintah? Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kekerasan seksual terkait dengan masalah HAM yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Oleh karena itu, pemerintah wajib melindungi hak-hak warga negara, tak terkecuali perlindungan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh membiarkan persoalan tersebut dan perlu mencari cara yang efektif untuk bersama-sama masyarakat menangani masalah tersebut.

Penyajian lisan kelompok dua, moderator mengundang kelompok portofolio dua untuk memasuki ruangan. Moderator meminta hadirin memberikan tepuk tangan yang menjadikan suasana meriah. Moderator mempersilahkan juru bicara memperkenalkan diri dan juga mengenalkan anggota-anggota kelompoknya. Setelah itu, ia mempersilahkan juru bicara kelompok portofolio satu menjelaskan masalah yang menjadi kajian kelas dihadapan dewan juri selama lima menit. Selanjutnya kelompok portofolio dua menyampaikan pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang

terjadi di kampus sebagai berikut: 1) memberikan hukuman sosial pada pelaku sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan pada korban, 2) menghilangkan kemampuan pro-kreasinya dengan melakukan pengebirian sebagai bentuk hukuman, 3) melakukan penguntitan dan pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang sebagai objek dalam informasi atau dokumen elektronik terkait tujuan seksual, 4) setiap perusahaan/lembaga menyiapkan ruang serta prasarana dan fasilitas pengaduan para pekerja/karyawan/mahasiswa/siswa untuk mendapat perlindungan, 5) diberikan hukuman pidana yang adil sesuai peraturan yang berlaku, 6) layanan SAPA 129 sebagai solusi dalam memberikan pendampingan terbaik bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 7) layanan bantuan hukum dalam hal pendampingan dan layanan pemulihan, dan 8) melakukan edukasi anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Penyajian lisan kelompok tiga, moderator mengundang kelompok portofolio tiga memasuki ruangan. Moderator meminta hadirin memberikan tepuk tangan sehingga suasana menyegarkan. Moderator mempersilahkan juru bicara memperkenalkan diri dengan mengenalkan anggota-anggota kelompoknya. Setelah itu mempersilahkan juru bicara kelompok portofolio empat menjelaskan masalah kajian kelasnya dihadapan dewan juri selama lima menit. Kelompok portofolio tiga bertanggung jawab membuat satu kebijakan publik tertentu yang disetujui oleh mayoritas kelas untuk mendukung serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan yang diusulkan adalah edukasi anti kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui seminar maupun media sosial khususnya bagi kalangan mahasiswa.

Penyajian lisan kelompok portofolio empat, Moderator mengundang kelompok portofolio empat memasuki ruangan. Moderator meminta hadirin memberikan tepuk tangan dan menjadikan suasana meriah. Moderator mempersilahkan juru bicara memperkenalkan diri dan mengenalkan anggota-anggota kelompoknya. Setelah itu mempersilahkan juru bicara kelompok portofolio empat menjelaskan rencana tindakan terkait edukasi anti kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Menjelaskan bagaimana kelas menumbuhkan dukungan individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rencana yang diusulkan. Menyampaikan siapa-siapa individu dan kelompok berpengaruh yang mendukung kebijakan yang diusulkan. Menyampaikan juga siapa individu dan kelompok masyarakat yang kemungkinan menentang kebijakan kelas yang diusulkan. Selanjutnya kelompok ini menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat meyakinkan mereka mendukung kebijakan yang diusulkan. Kajian Pengendapan atas Pengalaman Belajar Yang Dilakukan

Pada langkah terakhir melakukan pengendapan/refleksi dan perenungan mengenai hasil

belajar yang dicapai melalui model *project citizen* tersebut. Model *project citizen* dapat menguatkan *civic literacy* mahasiswa untuk resolusi kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Mahasiswa memiliki *civic literacy* resolusi kekerasan seksual di kampus dalam bentuk kebijakan publik. tentang edukasi tanpa kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Masalah-masalah baru memerlukan kebijakan publik baru. Membantu membuat kebijakan publik dan menentukan pendirian terhadapnya merupakan tanggung jawab setiap warganegara dalam masyarakat madani.

Sandars (2009) menyatakan bahwa refleksi merupakan proses metakognitif dimana mahasiswa kembali kepada pengalamannya untuk dapat memahami secara kritis situasi yang mereka alami dan memungkinkan mereka belajar dari situasi tersebut.

Mulyani (2020) menyatakan bahwa refleksi yang sangat berguna bagi sebuah kegiatan pembelajaran, bermanfaat bagi mahasiswa maupun dosen, diantaranya adalah bagi Dosen, kegiatan refleksi bisa berguna sebagai peninjauan pada sebuah kelompok atau kelas yang berguna untuk menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas sehingga potensi setiap individu dan sebuah grup bisa lebih terlihat. Hal tersebut bisa untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. sementara untuk mahasiswa, Aktivitas refleksi bisa berguna untuk mahasiswa untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan dilakukan. Apakah proses pembelajaran berlangsung baik atau tidak.

#### 4. KESIMPULAN

Mengacu pada proyek yang dilakukan, model *project citizen* dapat mengembangkan beragam *civic literacy* mahasiswa. Terkait dengan ini, penggunaan model *project citizen* dapat menguatkan *civic literacy* resolusi kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Mahasiswa memiliki *civic literacy* resolusi kekerasan seksual di kampus dalam bentuk kebijakan publik. tentang edukasi tanpa kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kebijakan yang dihasilkan Selain itu, model *project citizen* dapat menghadirkan kemandirian, gotong royong, tanggung jawab, kritis dan kreatif mahasiswa. Direkomendasikan untuk memaksimalkan model *project citizen* sebagai model pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai *civic literacy* bisa dilakukan penelitian lain.

#### 5. REFERENSI

Adam, A. (2019, Mei). Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'-Tirto.ID. <https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-anginsegar-dKUa>.

Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah penyintas kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta akan tempuh jalur hukum: "Sayamerasa takut dan gugup." BBC News

Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871>.

- Anditasari, R.D., et al (2023). Actualization of Civic Literacy in the Learning of Citizenship in High School. *International Journal Of Education Qualitative Quantitative Research*, 2 (1), 7-11.
- Apandie dan Rahmelia (2022). Project Citizen Mata Kuliah Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Di Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya. *Jurnal Civic Hukum*, 7 (2), 48-163.
- Aulia, A. (2019, Mei). Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan—Tirto.ID. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>
- Azmi, S. R. M. (2020). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pkn Berbasis Project Citizen Di Stmik Royal Kisaran. *Journal of Science and Social Research*, 3 (1), 64–72.
- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Bauerlein, M. (2012). Civic literacy. *Academic Questions*, 25(3), 328-333.
- Branson, M.S. (1998). The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy TASK Force Position Paper from the Communitarian Network. [http://www.civiced.org/articles\\_role.html](http://www.civiced.org/articles_role.html)
- Cogan, J.J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page
- Damayanti, Q. (2022, April). <https://jember.jatimnetwork.com/nasional/pr-513319294/kronologi-kekerasan-seksual-mahasiswa-uin-syarif-hidayatullah-jakarta>.
- Dwipayana, A. (2013). "Civic Literacy" Naskah Combine, Maret 2013, Fisipol.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Jurnal Sawwa*, 9 (1), 159-178.
- Faizal, A. (2020, Agustus). Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Halaman all—Kompas.com.
- Fudhul, H. (2020, February 21). Terjadi Lagi, Pelecehan Seksual di Kampus dan Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa. *Islami[Dot]Co*. <https://islami.co/terjadi-lagi-pelecehan-seksual-di-kampus/>.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. : *Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57-66.
- Huda, F.A. (2018). Pengertian dan Langkah-langkah Pembelajaran Project Citicen.
- Indriyani, D. (2019). Peranan Project Citizen terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (4), 20-29

- Khafsoh, N.A. & Suhairi (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20(1), 61-75.
- KP2K Klaten dan LKTS (Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial) – Boyolali “Survey tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Perilaku Seksual Terhadap Siswa SMA di Klaten”, 7 Januari 2023.
- Kurniawan, M.I., (2017). Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Strategi Active Learning, *Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 24-132.
- Maksum, H. (2015) Model Project Citizen Dalam Mengembangkan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa PGMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, *Jurnal Pendidikan Vionir*, 4 (2), 1-10.
- Mulyani, S. (2011). Upaya Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa melalui Pelaksanaan Model Pembelajaran Project Citizen pada Pembelajaran PKn, *Jurnal Civicus*, 11 (1), 56-70.
- Morgan, L.A. (2016). Developing Civic Literacy and Efficacy: Insights Gleaned Through the Implementation of Project Citizen. i.e.: inquiry in education, 8(1), 1-18.
- Nurdin, E.S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*. 9 (1), 11-30.
- Nurhasanah, S. et al. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Noviana, I., (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya. *Jurnal Sosio Informa*, 1 (1), 13-28.
- Octavialis, N. & Ananda, A. (2021). Pembinaan Literasi Kewarganegaraan di SMP Negeri 11 Padang. *Journal Of Civic Education*, 4 (2), 123-128.
- Pratiwi, R. (2022, Juni 2022). <https://www.detik.com/susel/hukum-dan-kriminal/d-6170016/oknum-dosen-unm-diduga-lecehkan-mahasiswa-saat-bimbingan-dinonaktifkan>
- Putera, A.Y.K. (2021, September 2021). <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/215123878/kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-unsri-2-dosen-jadi-terduga-pelaku?page=all>
- Rahman, I.N. (2016). Pengaruh Civic Literacy Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Politik Siswa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(1), 68-94.
- Safitri, et al. (2022). Keterampilan Komunikasi Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran IPA Berbasis, *Jurnal Basicedu*, 6 (2), 2654 - 2663
- Saidi, M.R., et al. (2022). Pengaruh Literasi Digital dan Literasi Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Ketahanan Pribadi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (1), 119-128.
- Sandars J. (2009) The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44. *Med Teach*. 2009;31(8), 685–695
- Saprya & Winataputra (2004). Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Laboratorium PKn Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung
- Sundawa & Dahliyana (2022). Strengthening civic education through project citizen as an incubator for democracy education. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 43, (1), 763-768
- Suryadi & Budimansyah (2009). Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori, Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Widya Aksara Press.
- Suryadi, K. (2010), “ Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi partai Politik bagi Penguatan Civic Literacy “Naskah Pidato pengukuhan Jabatan guru Besar Ilmu Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 24 November 2010.
- Swift, C. (2017). Stakeholders perceptions of a civic education program at an international school in Europe [Doctoral dissertation, University of Minnesota]. [https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/206366/Swift\\_umn\\_0130E\\_18369.pdf?sequence=1](https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/206366/Swift_umn_0130E_18369.pdf?sequence=1).
- Trisiana, A. & Wartoyo (2020), Project Citizen: Inovasi Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Surakarta: Unisri Press.
- Vontz, T. S., & Patrick, J. J. (2000). Historical and philosophical foundations of Project Citizen. In S. Mann & J. Patrick (Eds.), *Education for civic engagement in democracy: Service learning and other promising practices* (pp. 93-101). Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education.
- Yuliadari, E., et al. (2028). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembelajaran Demokarsi dan Pemilu dan Implikasinya Terhadap Civic Atitude Mahasiswa. *Jurnal PKn Progresif*, 13 (2), 116-121.
- Yusuf, R., Hayati, E., & Fajri, I. (2019). Meningkatkan Literasi Digital Siswa Sekolah Menengah Atas Melalui Model Project Citizen. In *Prosiding Seminar Nasional “Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia”* (1), 185-200). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
- White, T. K., Whitaker, P., Gonya, T., Hein, R., Kroening, D., Lee, K., ... & Hayes, E. (2009). The use of interrupted case studies to enhance critical thinking skills in biology. *Journal of microbiology dan biology education*, 10(1), 25-31.
- Widiatmaka (2016). Kendala Pendidikan

- Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Peserta Didik Di Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Civic*, 13 (2), 188-198.
- Wijaya, C. (2019, March 29). Dugaan pelecehan seksual di kampus: Kesaksian “Zahra” dan “Sandra”, dua mahasiswi di Bandung. *BBC News Indonesia*.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47314777>.
- Winataputera & Budimansyah (2007). *Civic Education : Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*, Bandung : Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zuhra, W. (2019, Mei). Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang—Tirto.ID.  
<https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4>.